



MODUL *PROBLEM BASED LEARNING*
MATA KULIAH
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Lisdiana, M.SI

Dr. Deby Chintia Hestiriniah, M.Si

Dr. Arif Rahman Hakim, M.Si

MODUL *PROBLEM BASED LEARNING*

**MATA KULIAH ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK**



“PROSES KEBIJAKAN PUBLIK”

Lisdiana

Deby Chintia Hestiriniah

Arif Rahman Hakim

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
STISIPOL CANDRADIMUKA**

2024

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan modul **mata kuliah Analisis Kebijakan Publik** untuk pertemuan ke-2 terkait **“Proses Kebijakan Publik”** Modul ini akan digunakan untuk mahasiswa S1 Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka.

Penulis dalam penyusunan modul ini mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan modul ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si selaku Ketua STISIPOL Candradimuka yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
2. Dr. Lisdiana M.Si selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STISIPOL Candradimuka.
3. Dr. Arif Rahman Hakim, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIPOL Candradimuka.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan modul ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan rancangan yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Palembang, 11 November 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kegiatan	1
B. Tujuan Kegiatan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Proses Kebijakan Publik	8
B. Perencanaan Kebijakan Publik (<i>Policy Planning</i>)	12
C. Perumusan Kebijakan (<i>Policy Formulation</i>)	17
D. Implementasi Kebijakan Publik (<i>Policy Implementation</i>) 22	
E. Evaluasi Kebijakan Publik (<i>Policy Evaluation</i>)	25
BAB III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	33
BAB IV. ANALISIS KASUS	37
BAB V. PENUTUP	40
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi berbagai masalah publik. Kebijakan publik bukan hanya soal keputusan yang dibuat pemerintah, melainkan sebuah proses yang melibatkan analisis mendalam, konsultasi, serta implementasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Dunn (2017), kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah- masalah tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses kebijakan ini tidak selalu linier, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya negosiasi, kompromi, dan bahkan konflik.

Dalam konteks Indonesia, proses kebijakan sering kali melibatkan dinamika

politik dan sosial yang kompleks. Keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, semakin memperkuat proses kebijakan sebagai arena multi-aktor. Anderson (2015) menyatakan bahwa partisipasi banyak pihak dalam proses kebijakan dapat memperkaya opsi kebijakan yang dipertimbangkan, namun juga memperlambat proses pengambilan keputusan karena banyaknya kepentingan yang perlu diselaraskan. Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi semakin penting seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih dekat dengan masyarakat setempat.

Proses kebijakan mencakup berbagai tahapan mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Menurut Weimer dan Vining

(2017), analisis kebijakan yang baik harus melibatkan evaluasi dari setiap tahapan ini untuk memastikan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Di Indonesia, tantangan besar dalam proses kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Banyak kebijakan yang secara konseptual baik, namun menemui kendala dalam implementasi akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi yang buruk, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses kebijakan kini semakin terbuka terhadap partisipasi publik melalui platform digital. Menurut Birkland (2019), digitalisasi memungkinkan proses kebijakan menjadi lebih transparan dan inklusif, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam hal penyaringan informasi dan pengelolaan data. Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam

proses kebijakan telah dimulai dengan platform-platform seperti e-budgeting dan sistem informasi kebijakan yang memungkinkan akses publik terhadap informasi kebijakan secara lebih mudah dan transparan. Teknologi juga telah mendorong lahirnya gerakan-gerakan advokasi kebijakan yang berbasis pada media sosial, yang mempercepat penyebaran ide dan mempengaruhi proses kebijakan.

Namun, meskipun perkembangan teknologi telah mempermudah partisipasi, proses kebijakan masih harus menghadapi tantangan terkait dengan ketimpangan akses terhadap teknologi di kalangan masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Hofstede (2001), faktor budaya dan sosial mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan berpartisipasi dalam proses kebijakan. Di Indonesia, faktor kultural seperti hierarki sosial dan kebiasaan kolektif mempengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan, yang sering kali lebih bersifat representatif daripada langsung.

Selain itu, proses kebijakan publik juga harus mampu menanggapi tantangan- tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, migrasi, dan globalisasi ekonomi. Menurut Held dan McGrew (2007), kebijakan global saat ini menuntut pendekatan yang terintegrasi, di mana negara-negara tidak lagi dapat merumuskan kebijakan secara isolatif tanpa mempertimbangkan dampaknya di tingkat internasional. Di Indonesia, kebijakan lingkungan dan ekonomi nasional saat ini sangat dipengaruhi oleh komitmen internasional seperti Paris Agreement, yang memerlukan adaptasi kebijakan di tingkat nasional agar sesuai dengan standar global.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh seberapa baik proses kebijakan tersebut

dikelola. Menurut Patton, Sawicki, dan Clark (2015), evaluasi yang terus-menerus terhadap proses kebijakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja kebijakan dan menyesuaikannya dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, evaluasi kebijakan sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengumpulan data yang akurat dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik, evaluasi kebijakan kini menjadi bagian integral dari proses kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian, proses kebijakan bukan hanya sekadar mekanisme untuk memecahkan masalah publik, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang baik harus mampu merespons perubahan zaman dan

menyesuaikan diri dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Mahasiswa mampu memahami tahapan- tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari identifikasi isu hingga implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Kebijakan Publik

Menurut buku Kamus Administrasi Publik, Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008) *public policy* adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan, Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Disini dapat dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat sebagai pemanfaatan strategis dari sumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan (Donahue dalam Keban, 2008:60).

W.I. Jenkins (dalam Abdul Wahab, 2008) merumuskan kebijakan publik sebagai:

“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”. (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Chief J.O. Udoji (dalam Abdul Wahab, 2008), mendefinisikan kebijakan publik sebagai: *“an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large”*. (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang

diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Selanjutnya Peterson (dalam Keban, 2008) berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan secara singkat bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan dari pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Menurut Dunn, dalam kebijakan publik ada beberapa tahap penting antara lain; penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy*

implementation), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*).

1. Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat per-masalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama *problem structuring*.
2. Pada tahap formulasi kebijakan, para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut *forecasting* dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan.
3. Adopsi kebijakan merupakan tahap berikutnya, dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui suatu proses rekomendasi.

4. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan.

5. Dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan.

B. Perencanaan Kebijakan Publik (*Policy Planning*)

1. Pengertian Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan

dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda yang lain.

Menurut Barbara Nelson (dalam Winarno,2002) menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan mobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

1. Syarat Isu Dapat Masuk Agenda Setting

Mark Rushefky (dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa suatu isu akan menjadi agenda melalui konjungsi tiga urutan, yaitu:

1. Urutan Pertama.

Pengidentifikasi, yakni tahap pengidentifikasi-an masalah yang didiskusikan sebelumnya.

2. Urutan kedua. Menitik beratkan pada kebijakan atau pemecahan masalah. Urutan kedua ini biasanya terdiri dari para spesialis di bidang kebijakan, seperti misalnya para birokrat, staf legislatif, akademisi, para ahli dalam kelompok-kelompok kepentingan; dan proposal yang dibawa oleh komunitas-komunitas tersebut.

3. Urutan ketiga. Merupakan urutan politik (*political stream*). Pada urutan ini biasanya disusun dari perubahan-perubahan dalam opini publik, hasil pemilihan umum, perubahan dalam administrasi dan pergantian partisipan atau ideologi dalam lembaga legislatif.

2. Jenis-Jenis Agenda Kebijakan

Menurut W. Cobb dan Charles D. Elder (dalam Winarno, 2012) mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yaitu:

1. Agenda Sistematis

Terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapatkan perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. Agenda ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasional dan daerah. Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada bila masalah tersebut diajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas.

2. Agenda Lembaga atau Pemerintah

Terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah. Karena terdapat bermacam-macam pokok agenda yang membutuhkan keputusan-keputusan kebijakan maka terdapat pula banyak agenda lembaga. Agenda lembaga merupakan agenda tindakan yang mempunyai sifat lebih khusus dan lebih konkret bila dibandingkan dengan agenda sistemik. Pokok- pokok agenda lembaga dapat dibedakan menjadi pokok-pokok agenda lama dan pokok-pokok agenda baru.

C. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

1. Definisi Perumusan Kebijakan Publik dan Pembentukan Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Winarno,2012), perumusan ke-bijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek seperti misalnya, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih diantara berbagai alternatif yang saling berkompetisi.

2. Tahap – Tahap dalam Perumusan Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Winarno,2012), tahap-tahap dalam perumusan kebijakan :

1. Tahap Pertama:

Perumusan Masalah (*Defining Problem*) Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. (Winarno, 2012).

2. Tahap Kedua: Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi di antara satu dengan

yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR), kalangan eksekutif (presiden dan para pembantunya), agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan. (Winarno,2012)

3. Tahap Ketiga: Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. (Winarno, 2012)

1. Tahap Keempat : Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya. (Winarno, 2012)

D. Implementasi Kebijakan Publik (*Policy Implementation*)

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Daniel A. Mazmanian dan Paul

A. Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2008), menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, sedangkan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah

proses pelaksanaan dari kebijakan itu, dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan dan mengarah pada tujuan yang telah disepakati, serta membawa dampak dalam masyarakat. Selanjutnya ketika kita memahami implementasi kebijakan, maka kita akan memahami apa yang kemudian terjadi setelah kebijakan tersebut diformulasikan atau dirumuskan. Hal yang penting dalam sebuah kebijakan tersebut adalah dimana ketika kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak diimplementasikan secara baik.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Secara prinsip terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan.

Pemilahan pertama adalah implemenasi kebijakanyang berpola dari atas ke bawah (*top-down*) dan kebalikannya adalah dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan beberapa tokoh oleh Nugroho (2009) dipetakan sebagai berikut :

1 : Model Donald van Meter dan Carl Van Horn

2 : Model Daniel Mazmanian dan Paul

A. Sabatier

3 : Model W. Hoogwod dan Lewis A. Gun

- 4 : Model Malcolm Goggin dkk
- 5 : Model Merilee S. Grindle
- 6 : Model Richard Elmore dkk.
- 7 : Model Edward III
- 8 : Model Robert T. Nakamura and Frank Smallwood
- 9 : Model Network

E. Evaluasi Kebijakan Publik (*Policy Evaluation*)

1. Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan un-tuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2012), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.

1. Tugas Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak.
2. Tugas Kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas

kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi- konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan.

2. Tipe – Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

a. Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan- pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan- kebijakan, program-program dan

proyek-proyek. Pertimbangan- pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan- pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria- kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

b. Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang

menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni

kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

c. Tipe Ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Evaluasi sistematis ini memberikan konsekuensi bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari

kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan- penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program- program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan- kebijakan dan program-program lain di masa depan.

3. Beberapa Langkah dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Suchman (dalam Winarno, 2012) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

BAB III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kelas

1. Pemilihan Kasus: Pilih kasus nyata yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Kasus harus menantang dan dapat memicu diskusi.
2. Penyediaan Materi: Siapkan materi tambahan seperti artikel, data, atau video yang mendukung pemahaman tentang kasus.
3. Pembagian Kelompok: Bentuk kelompok kecil (4-6 mahasiswa) untuk memfasilitasi diskusi yang mendalam.

B. Pengantar

1. Penjelasan Konsep: Mulai kelas dengan menjelaskan tujuan Problem Based Learning dan bagaimana metode ini akan digunakan untuk mempelajari kasus.

2. Presentasi Kasus: Sajikan kasus secara ringkas. Berikan konteks yang cukup agar siswa memahami latar belakang dan isu yang dihadapi.

C. Diskusi Kelompok

Analisis Kasus: Minta setiap kelompok untuk menganalisis kasus secara mendalam. Dorong mereka untuk mengidentifikasi masalah, pihak terkait, dan potensi solusi.

D. Presentasi dan Debat

1. Presentasi Kelompok: Setiap kelompok mempresentasikan analisis dan solusi mereka kepada kelas.

2. Sesi Tanya Jawab: Setelah presentasi, buka sesi tanya jawab untuk mendorong interaksi dan memperdalam pemahaman.

E. Diskusi Kelas

1. Diskusi Terbuka: Fasilitasi diskusi terbuka tentang berbagai pendekatan yang diusulkan oleh kelompok.
2. Refleksi: Ajak mahasiswa untuk merefleksikan proses yang mereka lalui, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang didapat.

F. Penutup

1. Kesimpulan: Ringkas poin-poin penting dari diskusi dan highlight berbagai perspektif yang muncul.
2. Tugas Tindak Lanjut: Berikan tugas individu atau kelompok untuk mendalami aspek tertentu dari kasus atau untuk mengaplikasikan pembelajaran ke situasi lain.

G. Evaluasi

1. Umpan Balik: Kumpulkan umpan balik dari mahasiswa tentang pengalaman belajar mereka.
2. Penilaian: Evaluasi berdasarkan partisipasi, presentasi, dan pemahaman terhadap kasus.

BAB IV. ANALISIS KASUS

Tugas Analisis

Untuk Urai Macet, Pemkot Malang akan Perkuat Transportasi Publik

<https://www.malangtimes.com/baca/300774/20231121/042000/untuk-urai-macet-pemkot-malang-akan-perkuat-transportasi-publik>

JATIMTIMES - Upaya mengurai kemacetan di Kota Malang terus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga melibatkan forum lalu lintas dan angkutan jalan (FLLAJ) dalam merumuskan solusi dalam mengurai macet di Kota Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, salah satu kebijakan yang kemungkinan akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan transportasi publik. Tujuannya, agar volume penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang.

"Di sinilah kita perlu adanya edukasi agar bagaimana masyarakat bisa lebih tertarik memanfaatkan publik

transport untuk mengawal kegiatan kita dari satu tempat ke tempat lain," ujar Erik, Selasa (21/11/2023).

Sebagai langkah awal, Erik menilai perlu adanya perumusan semua titik-titik yang tingkat kemacetannya terbilang tinggi. Termasuk di persimpangan-persimpangan yang terdapat traffic light. Yang menurutnya, perlu ada penyesuaian lebar kaki simpang.

"Artinya, titik-titik simpang untuk bisa mengalirkan arus belok kiri jalan terus, ataupun kalau ada lampu merah antreannya tidak terlalu panjang sekali. Nah ini yang akhirnya perlu pelebaran jalan, pengadaan tanah yang prosesnya cukup panjang dan tidak mudah," terang Erik.

Erik menilai, transportasi publik merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk mengurai kemacetan. Sebab menurutnya, konstruksi dan kondisi jalan di Kota Malang tentu tidak dapat secara terus menerus mewadahi jumlah kendaraan yang setiap hari bertambah.

"Jadi mulai dari lebar jalannya, panjangnya, fly over yang terbangun, itu gak akan pernah menjawab kebutuhan dari jumlah kendaraan yang terus bertambah," tutur Erik.

Selain itu, Erik mengatakan bahwa Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga berpesan agar sarana dan prasarana (sarpras) transportasi yang dibangun, mengarah pada penguatan transportasi publik. Yakni agar warga bisa lebih tertarik dalam menggunakan transportasi umum.

"Ini masih akan kita rumuskan transportasi publik yang nantinya bisa menampung pergerakan masyarakat secara maksimal. Jadi kita bisa mengurangi secara signifikan jumlah kendaraan roda 2, roda 4, yang nantinya banyak berlalu lalang di jalan ini," pungkas Erik.

Tugas Analisis

Silakan lakukan analisis mengenai kebijakan di Kota Malang untuk menguraikan permasalahan kemacetan mulai dari identifikasi isu hingga implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut.

BAB V. PENUTUP

Proses kebijakan publik merupakan rangkaian langkah yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai aktor dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Pemahaman terhadap proses ini menjadi sangat penting, terutama bagi para akademisi, analis, dan calon pembuat kebijakan, karena kebijakan yang baik dapat menjadi alat utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di setiap tahap, mulai dari perumusan hingga evaluasi, setiap keputusan membawa implikasi luas bagi kepentingan publik.

Selain itu, di era modern ini, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan semakin diakui pentingnya. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tidak hanya memperkaya diskusi, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Inklusivitas dalam kebijakan publik memungkinkan terciptanya solusi yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses kebijakan juga semakin terbuka terhadap inovasi digital yang memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Teknologi tidak hanya mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memungkinkan analisis data yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, inovasi teknologi menjadi faktor kunci dalam memajukan proses kebijakan ke arah yang lebih efektif dan efisien.

Evaluasi kebijakan menjadi tahapan penting yang sering kali dilupakan. Melalui evaluasi, kebijakan dapat dikaji ulang, dianalisis efektivitasnya, dan diperbaiki untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan adanya evaluasi yang baik, proses kebijakan akan terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan yang muncul di masa depan.

Pada akhirnya, modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang berbagai aspek dalam proses

kebijakan, mulai dari teori hingga praktik. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan publik secara kritis, serta berkontribusi aktif dalam upaya perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan pemahaman ini, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya kebijakan publik yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi 2. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anderson, J.E. 2015. *Public Policymaking*. Cengage Learning.
- Birkland, T.A. 2019. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. Routledge.
- Dunn, W.N. 2017. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Held, D., & McGrew, A. 2007. *Global Public Policy: Governance Without Government?* Polity Press.
- Hofstede, G. 2001. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Sage.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi 2. Yogyakarta : Gava Media.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Patton, C.V., Sawicki, D.S., & Clark, J.J. (2015). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Routledge.

Weimer, D.L. & Vining, A.R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Pearson.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo